

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene

Sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, Bappeda Kabupaten Majene berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan kemana arah pembangunan daerah. Selain itu Bappeda juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan di Kabupaten Majene.

Dengan peran yang sangat menentukan dalam pembangunan daerah, Bappeda hendaknya dapat bekerja secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pembangunan karena yang akan merasakan dampak dari pembangunan nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Majene. Produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Produk yang dihasilkan melalui proses yang professional

tentunya akan lebih berkualitas karena pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan akademis teknokratis dan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Majene. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Majene.

Banyak pihak berpendapat bahwasanya pembangunan daerah sejak diterapkannya otonomi daerah masih belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, termasuk di Kabupaten Majene. Pembangunan di segala sektor memang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini belum terintegrasi secara baik. Pembangunan di beberapa sektor dilakukan tanpa memperhatikan sektor lainnya yang terkait, sehingga ada kesan pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung. Pembangunan yang terintegrasi secara horizontal dan

vertikal sebenarnya dapat menciptakan sinergi yang akan membuat hasil pembangunan menjadi lebih optimal. Disinilah dituntut peran Bappeda sebagai lembaga perencanaan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang dapat mengintegrasikan secara horizontal dan vertikal seluruh sektor kehidupan yang ada.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Majene seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.

Pembangunan yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah selama ini juga dianggap kurang efektif dan efisien. Pembangunan dengan biaya yang besar banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun beberapa diantaranya tidak terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada kegiatan yang *overlap*, duplikasi dalam anggaran serta kekaburan dalam target. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tersebut telah melenceng dari tujuan pembangunan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disini, kembali Bappeda dituntut untuk menyusun perencanaan pembangunan yang efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan efisien atau

dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik.

Selain itu, perencanaan pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan ketersediaan data serta informasi. Data dan informasi yang diperlukan untuk urusan perencanaan, berasal dari masing-masing SKPD yang menangani urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam kerangka kegiatan penghimpunan data serta informasi untuk kepentingan penyusunan perencanaan, sangat membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene. Oleh karena itu, sesungguhnya Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tergantung dengan keadaan eksternal yang berasal dari seluruh SKPD yang ada. Dibutuhkan kerja sama serta jalinan koordinasi yang baik dan konstruktif terhadap seluruh SKPD yang ada agar tugas dan fungsi tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang perencanaan, sehingga diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Badan Perencanaan Kabupaten Majene, terutama masyarakat Kabupaten Majene.

Keberadaan aparatur perencana baik pada BAPPEDA maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada penjelasan ini berisikan visi - misi Kabupaten Majene Tahun 2011 – 2016 beserta penjelasannya. Visi - misi ini merupakan perwujudan dari visi - misi pasangan H. Kalma Katta, S.Sos, MM - Drs. H. Fahmi Massiara, MM sebagai pasangan terpilih pada Pemilukada 12 Mei 2011. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2011 - 2016 merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi misi tersebut sehingga dituangkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Majene.

Visi Pembangunan Kabupaten Majene merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Periode 2005 - 2025, RPJM Nasional 2010 – 2014, serta mengacu pada RPJM Provinsi Sulawesi Barat Periode 2005 - 2011, serta dinamika lingkungan dan isu strategis baik yang bersifat global, nasional maupun lokal seperti efektifitas pelayanan publik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pembangunan pedesaan, peningkatan mutu

pangan, pembangunan infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan yang kesemuanya mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Majene yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Bappeda Kabupaten Majene. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene periode 2011-2016 dalam masa kepemimpinannya adalah :

‘TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA’

Penjelasan Visi :

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang	Kesejahteraan	Kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, mencakup kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya		dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.
	Adil dan Merata	Suatu kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah, serta setiap warga berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan
	Tata Pemerintahan yang Baik	Suatu kondisi pemerintahan yang menjalankan prinsip - prinsip <i>Good Governance</i> yang meliputi Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi & Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan Kedepan, Partisipasi, dan Penegakan Hukum.
	Bersih	Suatu kondisi yang baik, keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
		pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
	Berwibawa	Suatu kondisi pemerintahan yang bertanggung jawab, mengutamakan pelayanan optimal dengan hasil yang maksimal, menjaga profesionalisme, serta memiliki integritas yang tinggi
	Demokratis	Suatu kondisi pemerintahan kabupaten majene yang mengutamakan kepentingan masyarakat, aspiratif, tidak diskrimatif dan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
	Agamis	Suatu kondisi masyarakat majene yang menganut nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama yang menjadi karakter dan identitas masyarakat, serta menjiwai, mewarnai, dan menjadi pedoman bagi seluruh aktifitas kehidupan, termasuk

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
		penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama
	Berbudaya	Suatu kondisi masyarakat yang memiliki nilai - nilai budaya yang baik, <i>mala'bi</i> yang melekat pada jati diri seluruh masyarakat dan terus ditumbuhkembangkan seiring dengan laju pembangunan serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan social dengan tetap menjaga dan menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintahan;

2. Peningkatan Akselerasi Pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan;
3. Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta sarana-prasarana daerah;
5. Penyelenggaraan Pembangunan berkelanjutan;
6. Penerapan Prinsip-Prinsip tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
8. Optimalisasi pengelolaan Sumber daya alam; dan
9. Peningkatan peran lembaga keuangan daerah untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan aparatur pemerintahan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Masyarakat dan aparatur pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya APK/APM 2. Meningkatnya Angka Melek Huruf 3. Meningkatnya angka kelulusan siswa 4. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 5. Meningkatnya Rasio Guru Murid 6. Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi 7. Meningkatnya AHH 8. Meningkatnya status gizi masyarakat 9. Meningkatnya cakupan sanitasi dasar 10. Meningkatnya cakupan imunisasi pada balita 11. Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat 12. Pengembangan kapabilitas PNS melalui Jenjang pendidikan formal dan non formal 13. Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan sanksi dan penghargaan 14. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui diklat struktural dan fungsional secara berjenjang 15. Peningkatan kualitas hidup dan peran wanita dalam

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			pembangunan
2.	Peningkatan Akselerasi Pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik dan keamanan yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya PDRB dalam menyokong perekonomian daerah 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat 3. Menurunnya angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja 4. Tersedianya produk hukum yang mendukung iklim investasi 5. Penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas 6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan Profesionalisme aparat penegak hukum 7. Terselenggaranya program transmigrasi pada wilayah kab. Majene 8. Terselenggaranya pembinaan bidang kesejahteraan social
3.	Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan.	Terlaksananya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lestarinya nilai-nilai keagamaan & kearifan lokal dalam pembangunan daerah 2. Pencegahan permasalahan SARA 3. Meningkatnya peran tokoh keagamaan dalam pembangunan 4. Pelestarian cagar budaya 5. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			daerah 6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji 7. Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan
4	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta sarana-prasarana daerah	Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah yang memadai.	1. Tersedianya Infrastruktur kebinamargaan dalam menjangkau seluruh wilayah 2. Tersedianya Infrastruktur keciptakarya dalam mendukung ketersediaan kawasan perumahan yang sehat dan layak huni. 3. Terlayannya penduduk dengan pelayanan air bersih. 4. Terkendalinya masalah banjir perkotaan dan perdesaan 5. Tersedianya Infrastruktur PSDA dalam mendukung peningkatan hasil pertanian & pengamanan permukiman 6. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah. 7. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 8. Tersedianya sarana-prasarana perhubungan yang representatif 9. Tersedianya sarana - prasarana kesehatan 10. Tersedianya sarana - prasarana pendidikan 11. Tersedianya sarana -

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			prasarana pemerintahan umum
5.	Penyelenggaraan Pembangunan berkelanjutan	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan Pengelolaan hasil SDA yang terkendali 2. Berkurangnya kasus Perambahan hutan 3. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis 4. Terlaksananya penanganan persampahan 5. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau. 6. Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan 8. Pengembangan upaya mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 9. Terbitnya perda tentang Pengelolaan lingkungan hidup daerah 10. Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/ kebakaran hutan & permukiman padat penduduk
6.	Penerapan Prinsip-Prinsip tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan system perencanaan pelaksanaan dan pengawasan

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Yang Baik (Good Governance) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan	professional, demokratis, bersih, efektif dan efisien.	<p>pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pemeriksaan keuangan 3. Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Optimalisasi potensi dan pencapaian target Pendapatan Daerah 5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara periodik dan tepat waktu 6. Terwujudnya tertib pengelolaan arsip daerah 7. Optimalisasi aplikasi SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah 8. Optimalisasi Penegakan perda 9. Terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian yang Profesional
7.	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan prima melalui Implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di Instansi pemerintah 2. Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat 3. Terlaksananya Survey indeks kepuasan masyarakat 4. tertatanya administrasi kepemilikan lahan &

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya mutu pelayanan bidang pendidikan 6. Tersedianya jaringan IT di setiap kecamatan 7. Meningkatnya mutu pelayanan bidang kesehatan. 8. Meningkatnya status Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah 9. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat pemuda 10. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representative 11. Terselenggaranya event seni, budaya dan olah raga 12. Terlaksananya pengelolaan objek pariwisata daerah yang profesional 13. Tersedianya sistem pelayanan perijinan terpadu (PTSP) 14. Optimalisasi peran LSM sebagai sosial control dalam pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat 15. Meningkatnya peran media massa dalam dokumentasi dan penyebarluasan hasil - hasil pembangunan 16. Menurunnya pelanggaran hukum dan penyakit

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			masyarakat.
8.	Optimalisasi pengelolaan Sumber daya alam	Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah 2. Terlaksananya proses <i>Nilai tambah</i> Produk Pertanian 3. Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing 4. Tersedianya jaringan pemasaran produk pertanian 5. Terwujudnya Ketahanan pangan daerah 6. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air & sumber daya energi alternatif 7. Eksplorasi & eksploitasi potensi-potensi pertambangan 8. Pengembangan objek-objek pariwisata daerah 9. Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif.
9.	Peningkatan peran lembaga keuangan daerah untuk mendorong ekonomi	Meningkatnya peran lembaga keuangan daerah dalam mendorong ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya Lembaga keuangan mikro daerah 2. Pemanfaatan pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat

Visi : **“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata dikabupaten Majene dalam Tata pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya”.**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	kerakyatan	karakyatan dalam rangka mengurangi pengangguran	3. Peningkatan pola kemitraan antara pengusaha menengah dengan pengusaha kecil mikro 4. Penguatan modal industri rumah tangga oleh lembaga keuangan daerah 5. Penguatan peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan 6. Berkembangnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berdasarkan uraian diatas, program-program yang harus dilaksanakan oleh Bappeda telah secara jelas tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majene 2011-2016. Oleh karena itu, Bappeda dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Bappeda dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Bappeda dalam mewujudkan Misi sekaligus Visi Bupati Kabupaten Majene, yakni terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata di Kabupaten Majene

dalam tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, demokratis dalam kehidupan agamis dan berbudaya.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Barat

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi ini disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antardaerah.

Oleh karena itu dalam menyusun rencana strategis, Bappeda hendaknya tidak hanya merujuk pada RPJMD Kabupaten Majene saja, namun perlu juga disinkronkan dengan dokumen perencanaan lembaga

terkait yang diantaranya adalah Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 berbunyi **”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang Andal, Kredibel dan Proaktif untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara”**. Dalam penjelasan Visi dijelaskan bahwa pengertian kata andal adalah mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan. Kredibel berarti menerapkan prinsip-prinsip good governance , yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan proaktif berarti antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

Adapun Misi Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam konteks perencanaanpembangunan, isu integrasi, sinkronisasi dan sinergi sebenarnya telah menjadi bahasan utama oleh lembaga perencanaan. Kementrian PPN/Bappenas memasukkan hal tersebut dalam salah satu misinya, yaitu misi pertama huruf a. Begitu pula dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini mengindikasikan

bahwa selama ini memang ada permasalahan yang terkait dengan hal itu, khususnya sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diantaranya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah. Dengan demikian, Bappeda Kabupaten Majene sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hendaknya memperhatikan hal tersebut dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Majene.

Adapun keinginan Provinsi untuk mewujudkan Kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu untuk dipertimbangkan. Hal tersebut sebenarnya secara implisit telah ada dalam beberapa misi RPJMD Kabupaten Majene. Meskipun demikian, acuan utama rencana strategis Bappeda Kabupaten Majene adalah RPJMD Kabupaten Majene bukan rencana strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga dalam menyusun kegiatan, Bappeda tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majene, namun disinkronkan dengan rencana strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan wilayah sebagai cerminan dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara serasi dan berkesinambungan, agar dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna di seluruh tingkatan administratif daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerataan dan berkeadilan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah, kaitannya dengan pengaruh faktor internal dan eksternal wilayah. Selanjutnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Revisinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai agenda perubahan yang diyakini akan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, maka semakin mempertegas bahwa penataan ruang merupakan bagian penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Substansi penerapan perundangan ini adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi daerah untuk menentukan kebijakan dan pembangunan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa dalam upaya untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah, hal ini perlu ditingkatkan sebagai perwujudan ketahanan nasional dan wawasan nusantara.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada Bab I Ketentuan Umum yang tercantum dalam Pasal 1 antara lain dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya pada Bab II tentang Asas dan Tujuan yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 dijelaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan

lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut, maka dalam penataan ruang harus tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sementara itu, penataan ruang

sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur wilayahnya termasuk kewenangan dalam mengatur penataan ruangnya. Penataan ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang suatu wilayah. Perencanaan tata ruang dipakai sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Sejalan dengan terus bergulirnya proses reformasi, telah banyak terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurung waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah tentu tidak ada jalan lain kecuali harus menyesuaikan diri dengan adanya tuntutan perubahan tersebut dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang responsif/partisipatif dan akuntabel. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah merupakan landasan pokok terhadap tuntutan perubahan dalam tatanan sosial politik dan sistem penyelenggaraan pemerintahan

dewasa ini dikaitkan dengan esensi perencanaan pembangunan itu sendiri termasuk di daerah.

Dalam hal ini, Bappeda kembali memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Bappeda hendaknya memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang sudah menjadi bagian dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene Tahun 2012-2032 yang ada untuk dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan. RTRW sedikit banyak dapat memetakan wilayah-wilayah yang bisa dan tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dengan pertimbangan kelestarian lingkungan. Sehingga peran ganda sumber daya alam, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomidan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan dapat berjalan dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Bappeda Kabupaten Majene saat ini, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja Bappeda. Penjelasan atas isu tersebut adalah :
 - a. Terbatasnya Sumberdaya Perencana sebagai penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Majene.

- b. Kurang terkaitnya kegiatan yang dilaksanakan dengan program Bappeda yang telah dicanangkan. Artinya, terdapat kegiatan yang dilakukan tetapi tidak diprogramkan oleh Bappeda, juga keadaan dimana rencana yang ada tidak direalisasikan.
- c. Belum konsistennya aplikasi tupoksi terhadap kegiatan yang ada di masing-masing bidang, yaitu :
 - Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi sehingga tupoksi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya;
 - Ada juga *given condition* yang kadang-kadang mengakibatkan Bappeda harus bekerja diluar tupoksinya.
- d. Terbatasnya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah dari dinas/instansi.
- e. Kurangnya sosialisasi tentang produk perencanaan daerah terhadap dinas/instansi terkait dan juga terhadap publik.
- f. Belum optimalnya peran fungsi koordinasi Bappeda, baik internal maupun eksternal.
- g. Belum jelasnya pendelegasian kewenangan, baik dalam hal kewenangan fiskal (anggaran/APBD) maupun kewenangan dalam mengelola sebuah program antara Bappeda dengan instansi lain.

2. Masih terbatasnya kerangka regulasi perencanaan daerah, yang menyangkut perencanaan penganggaran tahunan dan juga perencanaan umum sektoral.
3. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.

3.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan

Isu dan permasalahan perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan lebih menekankan pada :

3.5.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas SDM, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK; peningkatan pelayanan kesehatan melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat tidak mampu, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dalam optimalisasi peningkatan kualitas SDM, pelayanan bidang pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah dan senantiasa teridentifikasi kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Pengelolaan pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa yang harus dikelola secara profesional.

Pendidikan harus berakar pada potensi lokal tetapi bergerak secara global. Penanganan masalah pendidikan difokuskan pada masalah :

- a. Persoalan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,
- b. Persoalan pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
- c. Persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik Pendidikan

Dilain sisi peranan sektor Kesehatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk dapat menurunkan Angka Kematian bayi, meningkatnya Angka harapan hidup, status gizi Masyarakat, cakupan sanitasi dasar, dan meningkatnya cakupan imunisasi pada balita serta Peningkatan kualitas hidup dan peran wanita dalam pembangunan. Dilain sisi Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas SDM serta pengembangan kapabilitas PNS melalui jenjang Pendidikan formal dan non formal sehingga mampu menciptakan suatu Peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

3.5.2.2 Akselerasi Pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan

Akselerasi pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, merupakan arahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik dan keamanan yang kondusif sehingga sasarannya untuk dapat meningkatkan PDRB dalam menyokong perekonomian daerah, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, menurunnya angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja,

tersedianya produk hukum yang mendukung iklim investasi, penyelesaian kasus sengketa tanah dan tapal batas wilayah, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum, terselenggaranya program transmigrasi pada wilayah Kabupaten Majene serta terselenggaranya pembinaan pada bidang Kesejahteraan sosial.

3.5.2.3 Penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan

Penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam pembangunan merupakan salah satu pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan, dalam hal ini untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah, pencegahan permasalahan SARA, meningkatkan peran tokoh agama dalam pembangunan, pelestarian cagar budaya, pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dalam hal ini kualitas pengelolaan haji serta pengembangan sarana dan prasarana peribadatan yang mampu menjadi sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan.

3.5.2.4 Percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, merupakan prasarana pendukung pembangunan, harus ditingkatkan pembangunan dan pemeliharannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta

peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya dan akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Majene dan bahkan ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

3.5.2.5 Pembangunan berkelanjutan

Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu, pembangunan selayaknya dilakukan secara berkesinambungan mencakup seluruh sektor. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan, terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Pembangunan harus menganut asas keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan. Disamping itu, dimasa yang akan datang pembangunan Kabupaten Majene harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan agar mampu mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan

Kabupaten Majene, diharapkan menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi Masyarakat Majene dan daerah lainnya. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan daerah. Pembangunan dilakukan dengan mensekasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia serta kemampuan untuk menopang lingkungan dalam jangka panjang.

Pemenuhan kesejahteraan masyarakat diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

3.5.2.6 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan hanya masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*, masyarakat bangsa.

Efektivitas dan efesiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam mengembangkan sistem Perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik sehingga masyarakat mampu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara periodik dan tepat.

Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan itu transparan dan bebas

dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel serta menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota serta pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3.5.2.7 Pelayanan Publik

Perilaku ideal pejabat negara sebagai service provider adalah kemampuannya memberikan pelayanan publik, dengan responsif, akuntabel, transparansi, dan efisien. Responsif, artinya memberikan pelayanan sesuai keinginan masyarakat, akuntabel artinya memberikan pelayanan secara transparan dan dapat diakses oleh semua orang, transparansi artinya pelayanan publik yang terbuka, jujur, dan berkeadilan, sementara efisiensi mengisyaratkan pelayanan yang murah, cepat, dan hemat tenaga.

3.5.2.8 Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai pendukung sistem

kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan relatif mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Dengan menelaah kondisi sumber daya alam saat ini, mengakibatkan perlunya kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan Masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian dengan menggunakan lahan hutan akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat perladangan yang berpindah-pindah dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang menancam turunnya debit air dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan dari semua hal diatas adalah pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembangunan *data base* juga harus mengakomodasi kebutuhan akan sistem informasi

sumber daya alam (SDA). Dengan sistem informasi ini maka kebijakan dan implementasi pendayagunaan SDA secara lestari dapat terwujud.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukung dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan kebutuhan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pasokan air, serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas terhadap Masyarakat.

3.5.2.9 Peningkatan peran lembaga keuangan dalam mendorong ekonomi kerakyatan

Peningkatan peran kelembagaan keuangan dalam mendorong ekonomi kerakyatan adalah aspek yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Majene dimasa yang akan datang. Upaya menggeser paradigma “memberi” menjadi “ pemberdayaan” disadari bukan merupakan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi masa depan Kabupaten Majene. Fungsi pemberdayaan oleh pemerintah harus diterapkan secara bertahap dan pasti untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif masyarakat, dan perlahan

membentuk sifat produktif, inovatif, kreatif pada masyarakat dan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dengan memperhatikan pertanian, pariwisata, industri kecil dan kekuatan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara, untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder atau tersier (industri dan jasa) guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan.

3.5.3. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam konteks manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategi organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarannya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan **faktor internal** (kekuatan dan kelemahan), serta **faktor eksternal** (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, Analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi-atau unit organisasi – dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya (Rangkuti, 1998).

Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan internal

(Analisis Lingkungan Internal, ALI) yang meliputi kekuatan (strength) serta kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan eksternal (Analisis Lingkungan Eksternal, ALE) yang meliputi peluang (opportunity) serta ancaman (threat) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal organisasi yang sifatnya controllable. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.

3.5.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal Bappeda Kabupaten Majene

NO	KEKUATAN – S	NO	KELEMAHAN – W
S1	Struktur Organisasi yang jelas berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda (Dasar hukumnya jelas)	W1	Belum adanya tenaga jabatan fungsional perencana dan belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
S2	Sarana / prasarana Kerja yang cukup memadai	W2	Pola struktur organisasi belum optimal dan belum adanya Standar Operasional Prosedur
S3	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W3	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal dalam penyusunan perencanaan

S4	Kuantitas SD administrasi yang memadai	W4	Belum optimalnya sistem informasi perencanaan pembangunan
		W5	Lemahnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
NO	PELUANG – O	NO	ANCAMAN – T
O1	Dukungan kebijakan dalam hal penyediaan data dan komitmen pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah	T1	Adanya tuntutan dan aspirasi dari berbagai kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan
O2	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	T2	Peraturan perundangundangan yang sering berubah dan berganti
O3	Kerjasama dengan pihak lain (stake holder) dalam bidang perencanaan pembangunan	T3	Kurangnya koordinasi antar SKPD
O4	Adanya peran serta swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	T4	Adanya Perbedaan Persepsi tentang mekanisme Perencanaan Pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.

3.5.3.2. Analisis Strategi dan Pilihan (ASAP)

Analisis Strategi dan Pilihan (ASAP) merupakan evaluasi dan analisis lebih lanjut dan informasi yang telah dikembangkan pada tahap-tahap sebelumnya. Informasi tersebut sangat diperlukan dalam menentukan rangkuman kegiatan yang harus dilaksanakan dan harus berorientasi pada Misi dalam usaha menerapkan Visi. Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Bappeda mempergunakan analisis SWOT sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer

yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategis yaitu :

1. Strategi *Strength–Opportunities* (SO), yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 - Optimalisasi fungsi Bappeda sebagai *thinktank* pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada seefektif mungkin;
 - Optimalisasi dukungan SKPD/Instansi terkait dan kerjasama stakeholder terhadap pembangunan daerah
2. Strategi *Strength–Threats* (ST), yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan/ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
 - Memperkuat Implementasi peraturan perundangan dalam rangka memperbaiki Perbedaan Persepsi tentang mekanisme Perencanaan Pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif.
 - Mengoptimalkan anggaran yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas
3. Strategi *Weaknesses–Opportunities* (WO), yaitu strategi memperkecil/mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 - Konsolidasi antar SKPD dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan daerah
 - Penguatan SDM perencana untuk mendukung kebijakan daerah

- Peningkatan daya dukung SKPD lain dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka menciptakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
 - Konsolidasi institusi dalam rangka memperkuat koordinasi internal dan eksternal dalam penyusunan perencanaan.
4. Strategi *Weaknesses-Threats* (WT), yaitu strategi memperkecil/mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan/ancaman yang ada.
- Konsolidasi institusi dalam rangka memperkuat koordinasi (internal) dan eksternal tentang mekanisme perencanaan pembangunan
 - Mengoptimalkan sistem informasi perencanaan pembangunan guna menyatukan persepsi antara legislatif dan yudikatif.
 - Penguatan SDM perencana untuk penguatan perencanaan pembangunan daerah
 - Meningkatkan kualitas kebijakan daerah melalui pengkajian peraturan perundang-undangan.